



Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., I. P. U., ASEAN Eng

Administrasi **KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN**



Editor:

Laksma TNI Dr. Muhamad Risahdi., M.Si(Han)., M.Tr.Opsla
Laksma TNI Dr. Asep Iwa Somantri., S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksma TNI Askari., P.S.C., S.Ikom., M.Sc., M.A

Administrasi **KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN**

Kolonei Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., I. P. U., ASEAN Eng



ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN

Penulis:

**Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P.,
M.Tr.Opsla., I.P.U., ASEAN Eng**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Laksma TNI Dr. Muhamad Risahdi., M.Si(Han)., M.Tr.Opsla
Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri., S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksma TNI Askari., P.S.C., S.Ikom., M.Sc., M.A**

ISBN:

978-634-246-465-6

978-634-246-466-3 (PDF)

Cetakan Pertama:

November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya buku "**Administrasi Kebijakan Publik Bidang Pertahanan**" ini. Dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks—ditandai dengan ancaman multidimensi seperti siber, hibrida, dan non-tradisional—mengharuskan negara memiliki sistem pertahanan yang adaptif. Membangun postur pertahanan yang tangguh bukan lagi sekadar soal alutsista modern, tetapi juga tentang administrasi dan kebijakan yang efektif. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memahami bagaimana pengelolaan pertahanan dapat dioptimalkan melalui pendekatan kebijakan publik. Dengan perpaduan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis, buku ini memaparkan pentingnya sinergi antara kebijakan, anggaran, personel, dan logistik. Administrasi pertahanan yang mumpuni adalah prasyarat mutlak bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai **Visi Indonesia Emas 2045**. Semoga buku ini menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan pertahanan negara.

Jakarta, Agustus 2025

**Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P.,
M.Tr.Opsla., I. P. U., ASEAN Eng**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1: PENGANTAR ADMINISTRASI KEBIJAKAN	
PUBLIK BIDANG PERTAHANAN	1
A. Definisi dan Konsep Administrasi Kebijakan Publik dalam Konteks Pertahanan	1
B. Urgensi Administrasi yang Efektif dalam Pengelolaan Pertahanan Negara.....	4
C. Ruang Lingkup Buku dan Pendekatan Analisis	8
BAB 2: LANDASAN KEBIJAKAN PUBLIK	
BIDANG PERTAHANAN DI ERA MODERN.....	13
A. Perkembangan Lingkungan Strategis Global: Dampak Terhadap Perumusan Kebijakan Pertahanan	13
B. Lingkungan Strategis Regional dan Nasional: Implikasinya bagi Administrasi Pertahanan Indonesia	21
C. Respon Administrasi Pertahanan terhadap Ancaman Faktual dan Potensial	30
D. Integrasi Pertahanan Tradisional dan Nontradisional dalam Administrasi Publik	39
BAB 3: PROSES ADMINISTRASI KEBIJAKAN	
PUBLIK BIDANG PERTAHANAN	47
A. Perumusan Kebijakan Pertahanan: Tahapan dan Aktor Kunci	47
B. Implementasi Kebijakan Pertahanan: Tantangan dan Strategi.....	57
C. Monitoring, Evaluasi, dan Reformasi Kebijakan Pertahanan.....	65
D. Studi Kasus: Proses Administrasi Kebijakan Pertahanan di Indonesia	74
BAB 4: ADMINISTRASI PERTAHANAN	
MENUJU VISI INDONESIA EMAS.....	85
A. Peran Administrasi Pertahanan dalam Mencapai Visi Indonesia Emas 2045	85

B. Pembangunan Birokrasi Pertahanan yang Efisien dan Berintegritas.....	94
C. Administrasi Sumber Daya Pertahanan: Pengelolaan Anggaran, Personil, dan Logistik	110
D. Inovasi dan Transformasi Digital dalam Administrasi Pertahanan	119
BAB 5: PERBANDINGAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN: STUDI KOMPARATIF BARAT DAN TIMUR	129
A. Model Administrasi Kebijakan Pertahanan Negara Barat (AS dan NATO).....	129
B. Model Administrasi Kebijakan Pertahanan Negara Timur (Tiongkok dan Rusia)	138
C. Perbandingan Pola Administrasi dan Tantangan Khas	143
D. Pembelajaran dan Adopsi Model Administrasi yang Relevan bagi Indonesia	162
BAB 6: PENUTUP	171
A. Tantangan Utama Administrasi Kebijakan Pertahanan	171
B. Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Administrasi Pertahanan	189
C. Proyeksi Masa Depan Administrasi Kebijakan Pertahanan di Indonesia	196
DAFTAR PUSTAKA	205

BAB 1

PENGANTAR ADMINISTRASI

KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN

A. DEFINISI DAN KONSEP ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KONTEKS PERTAHANAN

Memahami administrasi kebijakan publik di bidang pertahanan adalah langkah awal yang krusial. Konsep ini menggabungkan dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu **administrasi publik** dan **studi pertahanan**, untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Administrasi publik sendiri secara klasik didefinisikan sebagai implementasi kebijakan pemerintah oleh birokrasi, atau secara lebih luas sebagai manajemen semua urusan publik (Wilson, 1887). Sementara itu, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau isu yang dianggap penting oleh masyarakat (Dye, 2017).

Ketika kedua konsep ini digabungkan, **administrasi kebijakan publik bidang pertahanan** dapat didefinisikan sebagai seluruh proses manajerial dan birokrasi yang dilakukan oleh negara untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Proses ini melibatkan berbagai aktor dan institusi, mulai dari lembaga legislatif,

BAB 2

LANDASAN KEBIJAKAN PUBLIK

BIDANG PERTAHANAN DI ERA MODERN

A. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL: DAMPAK TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN

Perumusan kebijakan pertahanan suatu bangsa tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari interaksi kompleks antara aspirasi nasional dan realitas lingkungan strategis global. Di era modern, lingkungan ini tidak lagi sekadar tentang persaingan militer konvensional, melainkan sebuah ekosistem yang dinamis dan saling terhubung. Pergeseran pusat gravitasi kekuasaan, revolusi teknologi, dan munculnya ancaman non-tradisional secara fundamental mengubah cara negara memandang dan merumuskan kebijakan pertahanannya. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi geopolitik yang krusial, memahami dinamika ini bukan hanya penting, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjamin kedaulatan dan keamanan nasional.

BAB 3

PROSES ADMINISTRASI

KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN: TAHAPAN DAN AKTOR KUNCI

Perumusan kebijakan pertahanan adalah jantung dari administrasi pertahanan sebuah negara. Ini adalah proses kompleks dan multidimensi yang melibatkan identifikasi masalah, perancangan solusi, dan pengambilan keputusan. Proses ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika politik domestik hingga gejolak lingkungan strategis global. Memahami tahapan dan aktor yang terlibat adalah kunci untuk menganalisis efektivitas administrasi pertahanan suatu negara.

1. Tahapan Perumusan Kebijakan Pertahanan: Sebuah Siklus yang Berkesinambungan

Proses perumusan kebijakan pertahanan dapat dianalisis melalui model siklus kebijakan publik, meskipun dengan adaptasi spesifik untuk konteks pertahanan. Tahapan ini tidak selalu linear, tetapi seringkali interaktif dan berulang.

BAB 4

ADMINISTRASI PERTAHANAN

MENUJU VISI INDONESIA EMAS

A. PERAN ADMINISTRASI PERTAHANAN DALAM MENCAPAI VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi **Indonesia Emas 2045** adalah sebuah cita-cita besar yang menempatkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berpengaruh di kancah global. Visi ini didasarkan pada empat pilar utama: pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberlanjutan pembangunan ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam narasi pembangunan holistik ini, peran administrasi pertahanan seringkali dianggap terpisah atau hanya sebagai pendukung pasif. Namun, kenyataannya, administrasi pertahanan adalah pilar yang sangat fundamental dan merupakan katalisator yang krusial untuk mewujudkan setiap aspek dari visi tersebut.

BAB 5

PERBANDINGAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN: STUDI KOMPARATIF BARAT DAN TIMUR

A. MODEL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BARAT (AS DAN NATO)

Administrasi kebijakan pertahanan di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), adalah model yang telah berkembang pesat dan sering dijadikan tolok ukur global. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar kuat pada nilai-nilai demokrasi liberal, seperti kontrol sipil, transparansi, dan akuntabilitas. Mempelajari model ini secara mendalam adalah kunci untuk memahami bagaimana negara-negara Barat mengelola kekuatan militer mereka dan implikasinya bagi arsitektur keamanan global.

1. Pengantar: Ciri Khas Model Administrasi Pertahanan Barat

Model administrasi pertahanan Barat memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari model lainnya. Ciri-ciri ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari evolusi historis dan politik yang panjang.

BAB 6

PENUTUP

A. TANTANGAN UTAMA ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN

1. Urgensi Evaluasi Administrasi Pertahanan

Administrasi kebijakan pertahanan merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam tata kelola negara modern. Fungsi utamanya adalah memastikan keamanan dan kedaulatan negara, sekaligus menciptakan stabilitas yang memungkinkan pembangunan nasional berjalan dengan lancar. Di tengah perubahan lingkungan strategis global yang penuh ketidakpastian, administrasi pertahanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Kebijakan pertahanan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai urusan militer. Ia telah melebur dalam konteks yang lebih luas, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan bahkan lingkungan hidup (Baylis, Wirtz, & Gray, 2019). Dengan demikian, pertahanan negara harus dipahami sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor multidimensi yang saling memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Biddle, S. (2017). *Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle*. Princeton University Press.
- Brömmelhörster, J., & Paes, W. (2005). *Defence Reform in a Changing World*. Springer.
- Brömmelhörster, J., & Paes, W. (2005). *Defence Reform in a Changing World*. Springer.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Cottey, A., Edmunds, T., & Forster, A. (2002). *Democratic control of the military in postcommunist Europe: Guarding the guards*. Palgrave Macmillan.
- Croissant, A., Kuehn, D., Chambers, P., & Wolf, S. O. (2010). Beyond the fallacy of coup-ism: Conceptualizing civilian control of the military in emerging democracies. *Democratization*, 17(5), 950–975. <https://doi.org/10.1080/13510347.2010.501180>
- Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Department of Defense. (2018). *Summary of the National Defense Strategy of the United States of America*. Washington, DC: DoD.
- Dugin, A. (2012). *The Fourth Political Theory*. Arktos Media.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.

- Emmers, R. (2003). *Cooperative security and the balance of power in ASEAN and the ARF*. Routledge.
- Fajar, F., & Kusumo, D. (2021). *Manajemen Pertahanan Nasional: Studi Kasus Pengelolaan Anggaran dan Alutsista*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 45-60.
- Feaver, P. D. (2003). *Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Fravel, M. T. (2019). *Active Defense: China's Military Strategy since 1949*. Princeton University Press.
- Friedberg, A. L. (2011). *A contest for supremacy: China, America, and the struggle for mastery in Asia*. W. W. Norton & Company.
- Galeotti, M. (2016). Hybrid War or Gibrinaya Voina? Getting Russia's non-linear military challenge right. Mayak Intelligence.
- Galeotti, M. (2016). *Hybrid War or Gibrinaya Voina? Getting Russia's non-linear military challenge right*. Mayak Intelligence.
- Glaser, C. L., & Cha, V. D. (2018). *The Rise of China and the Tragedy of the Indo-Pacific*. Foreign Affairs, 97(2), 27-33.
- Heginbotham, E., et al. (2015). *The U.S.-China Military Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power*. RAND Corporation.
- Hicks, K. H. (2011). *Green defense: Integrating sustainability into the military*. Center for Strategic and International Studies.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Holloway, D. (1982). *The Soviet Union and the Arms Race*. Yale University Press.
- Hosking, G. (2001). *Russia and the Russians: A History*. Harvard University Press.
- Hughes, C. (2015). *Japan's foreign and security policy under the 'Abe Doctrine': New dynamism or new dead end?* Palgrave Macmillan.
- Hughes, C. W. (2017). *Japan's Foreign and Security Policy under the 'Abe Doctrine'*. Palgrave Macmillan.

- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Harvard University Press.
- Jøsang, A. (2018). *Artificial Intelligence and National Security: Big Data, Machine Learning, and the Next Frontier*. *Journal of Defense Studies*, 12(3), 45–67.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045: Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang*. Bappenas RI.
- Kipp, J. (2012). Russia's Nonstrategic Nuclear Weapons. *Military Review*, 92(3), 35–45.
- Kofman, M., & McDermott, R. (2019). Russia's Military: Assessment, Strategy, and Capabilities. Center for Naval Analyses.
- Kohn, R. H. (2002). Building trust: Civil-military relations for effective national security. *Naval War College Review*, 55(1), 9–60.
- Kshetri, N. (2013). Cybersecurity and international relations. In *The global cybercrime industry* (pp. 183–206). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8248-9_8
- Laksmana, E. A. (2019). Civil–Military Relations in Indonesia after the Reform Era. *Asian Security*, 15(3), 245–267.
- Laksmana, E. A. (2019). Civil–military relations in Indonesia: The politics of military reform. *Contemporary Southeast Asia*, 41(3), 382–412. <https://doi.org/10.1355/cs41-3b>
- Lo, B. (2015). *Russia and the New World Disorder*. Brookings Institution Press.
- Mattern, J. B. (2005). *Why 'soft power' isn't so soft: Representational force and the sociolinguistic construction of attraction in world politics*. *Millennium*, 33(3), 583–612.
- McDermott, R. (2013). Russia's Conventional Armed Forces and the Georgian War. *Parameters*, 39(1), 65–80.
- McDermott, R. (2013). Russia's Conventional Armed Forces and the Georgian War. *Parameters*, 39(1), 65–80.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.

- Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Moon, C. (2012). *Military and Democracy in Korea: The Politics of Civil-Military Relations*. *Journal of Asian Studies*, 71(2), 367–389.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: Knopf.
- NATO. (2020). *NATO 2030: United for a new era*. NATO Public Diplomacy Division.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Pantoja, M. C. (2019). *Public Administration and Defense Policy*. University of the Philippines Press.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar hubungan internasional*. Remaja Rosda Karya.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2010). *Pengantar hubungan internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Posen, B. R. (2014). *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars*. Cornell University Press.
- Posen, B. R. (2014). *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars*. Cornell University Press.
- Prakoso, L. Y. (2022). *Ketahanan Maritim dan Bela Negara Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Purnomo, J. (2019). *Sistem Pertahanan Negara Semesta: Relevansi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rasmussen, A. F. (2014). *The Will to Lead: America's Indispensable Role in the Global Fight for Freedom*. HarperCollins.
- Sawyer, R. D. (2007). *The Art of War*. Barnes & Noble Classics.
- Scobell, A. (2003). *China's Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March*. Cambridge University Press.
- Shambaugh, D. (2002). *Modernizing China's Military: Progress, Problems, and Prospects*. University of California Press.

- Shambaugh, D. (2013). *China Goes Global: The Partial Power*. Oxford University Press.
- Singer, P. W., & Friedman, A. (2014). *Cybersecurity and cyberwar: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Snyder, J. (2011). *Myths of empire: Domestic politics and international ambition*. Cornell University Press.
- Soeharto, I. (2018). *Sistem Pertahanan Negara: Tantangan dan Reformasi*. Gramedia.
- Sukma, R. (2003). *Indonesia's Search for Strategic Autonomy: The Case of East Timor*. Routledge.
- Sukma, R. (2012). *Indonesia and the Strategic Challenge of the Asia-Pacific*. The National Bureau of Asian Research, 23(5), 1-18.
- Sukma, R. (2012). Indonesia's defense and security policy under democracy. In D. Singh (Ed.), *Southeast Asian affairs 2012* (pp. 115–131). ISEAS Publishing.
- Suryo, M. W. (2020). *Proses Perumusan Kebijakan Pertahanan di Indonesia*. Jurnal Pertahanan Nasional, 5(1), 12-25.
- Tan, A. T. H. (2012). *Security strategies in the Asia-Pacific: The United States' "Second Front" in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.
- Tan, A. T. H. (2017). *Singapore's Defence and Diplomacy: The Shaping of a City-State's Military Strategies*. Routledge.
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
- World Bank. (2023). *Military expenditure (% of GDP)*. The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS>
- Yusuf, A. (2017). Riset dan Pengembangan Industri Pertahanan di Indonesia: Tantangan dan Strategi. Jurnal Pertahanan, 3(1), 54-68.

Administrasi **KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN**

Administrasi kebijakan publik di bidang pertahanan merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. Bidang ini tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer semata, tetapi juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling berkaitan dalam mendukung sistem pertahanan nasional. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan pertahanan disusun melalui mekanisme birokratis yang melibatkan berbagai aktor, baik dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Administrasi kebijakan berperan penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis di bidang pertahanan selaras dengan kepentingan nasional serta prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.



SCANME

www.penerbitwidina.com
[@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
[penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
penerbitwidina@gmail.com
[widina store](#)
[widina bookstore](#)
0815-7000-699

Politik, Keamanan & Pertahanan

ISBN 978-634-246-465-6



9 786342 464656